

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA BULULOE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO

Muh. Tahir, Aswar Anwar, Samirah Dunakhir
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar
Email: tahir.jepot@gmail.com

ABSTRACT

Muh Tahir, 2019. The Analysis of the Village Budget Financial Management in Bululoe Village, District Turatea, Jeneponto Regency. Thesis, Faculty of Economic, Universitas Negeri Makassar. Supervised by Azwar Anwar, S.E., AK., M.Si., CA and Hj. Samirah Dinakhir, S.E., M.Bus., Ph.D., AK., CA.

This research aimed at knowing the village budget financial management in Bululoe Village, District Turatea, Jeneponto Regency. This research is qualitative research type. The population of this research was all the reports on budget financial management in Bululoe village and all documents which support them and the sampel of this research was the documents supporting the financial management year 2017. The data collection used desktop technique, observation, interview and documentation. The data analysis technique was in line with the Minister of Internal Affairs regulation number 113, year 2014 about the management of village financial and according to Village Financial Management Guidelines.

The result of this research shows that the financial management of the village budget in Bululoe village, District Turatea, Jeneponto Regency has not in accordance with the Minister of Internal Affairs regulation number 113 year 2014 about the management of village financial and Village Financial Management Guidelines.

Keywords: Village Budget Financial Management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran	Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional
--	--

pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Demi terwujudnya pemerintahan yang baik di setiap desa maka pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana dari APBN ke daerah dan disalurkan ketiap desa untuk membantu pemerintahan desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan kegiatan yang sifatnya diprioritaskan oleh negara saat ini. Dana tersebut

kemudian digunakan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta perangkatnya untuk melaksanakan program-program yang direncanakan pemerintah pusat terhadap desa yang mendapat alokasi dana desa dari APBN. Penyaluran dana tersebut merata keseluruh desa sejak tahun 2015 hingga saat ini.

Alokasi dana desa ke seluruh desa di Indonesia diharapkan dapat menunjang pembangunan akses jalan pedesaan, pengembangan program desa, sarana dan prasarana, ekonomi masyarakat serta kebudayaan. Sesuai aturan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 bahwa “dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pelestarian lingkungan hidup.

Dari pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa manfaat yang hendak dicapai adalah terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat menengah kebawah baik itu kesehatan, sarana dan prasarana, pendidikan serta terjaminnya

keberlangsungan ekonomi masyarakat untuk mendorong terwujudnya desa sejahtera.

Sejak diberlakukannya alokasi dana desa yang dianggarkan dari APBN maka perencanaan dan pengalokasian dana desa tersebut disalurkan keseluruh desa di Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Jeneponto dengan jumlah desa sebanyak 82 desa yang mendapat pengalokasian dana desa sejak tahun 2015-2017. anggaran Desa Bululoe dari tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan sehingga pemerintah desa dituntut dalam pengelolaan dana desa yang semakin baik, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan semua anggaran yang di peruntukkan untuk pembangunan desa betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Desa Bululoe yang berada tepatnya di Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto juga mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang sama besarnya dengan 81 desa lainnya di Kabupaten Jeneponto. Dana desa tersebut diperuntukkan dalam pembangunan desa baik dari

segi infrastruktur, sarana dan prasarana, pendidikan, ekonomi dan pengembangan masyarakat untuk mengembangkan potensi Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Sesuai dengan Permendes No. 5 Tahun 2015 bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan dana desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dialokasikan untuk membiayai sektor-sektor dipedesaan. Sejak pencairan dana desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015-2017 digunakan untuk membiayai beberapa sektor pembangunan di Desa tersebut termasuk akses jalan sebagai infrastruktur, pembangunan fasilitas kesehatan dan sebagainya.

Seluruh penggunaan dana di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dibuatkan dalam laporan pertanggung jawaban

dana desa oleh pemerintah desa setempat terkait rencana dan realisasi anggaran tersebut. Selain itu, Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam mengelola dana desanya diharuskan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan aturan permendagri nomor 113 tahun 2014 serta diharapkan mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi perairan, pertanian, pasar, peternakan dan perikanan. Dalam kaitannya dengan pemberian ADD di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Jeneponto Nomor 900 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015. Dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa

alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dampak dari adanya implementasi anggaran desa untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan juga berdasarkan Laporan Keuangan Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tahun 2017, penerimaan anggaran dana di desa tersebut dinilai cukup besar yaitu Rp 1.633.597.582,00.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto?

KEUANGAN DESA

Dalam UU Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

1. Pengertian

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan keuangan desa bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Muhammad Arif (2007:32) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1) Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

(2) Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangkai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(3) Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

(4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa maka sebelumnya akan dilakukan kegiatan musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam

rangka pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam musyawarah tersebut nantinya akan menghasilkan keputusan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

b. Penganggaran Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa maka salah satu tahapan yang penting adalah perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Adapun tahapan perencanaan dan penanggaran keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Desa
- 2) Belanja Desa
- 3) Pembiayaan

c. Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, tahapan selanjutnya setelah penganggaran adalah pelaksanaan keuangan desa yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

- 1) Pendapatan Desa

Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses penerimaan berbagai sumber pendapatan desa, antara lain pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa

misalnya penerimaan pungutan dan sewa; pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah supra desa (misalnya dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah dan bantuan keuangan) serta lain-lain pendapatan desa berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam APB Desa.

2) Pelaksanaan Belanja Desa

Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APB Desa.

3) Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan

Atas transaksi keuangan yang telah dilakukan maka wajib dikenakan pajak, Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan/pemotongan. Seluruh potongan pajak wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai ketentuan perpajakan.

d. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dimana proses

penetapan dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, keuangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan ini terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

(a) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepala desa kepada Bapak Bupati/Walikota tiap semester tahun berjalan. Untuk laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran.

(b) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan yang disampaikan mengenai penggunaan dana desa dari pemerintah yang dilaporkan secara terpisah dengan APB desa.

(c) Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa

Laporan yang dibuat secara keseluruhan mengenai pertanggung jawaban keuangan pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan uji hipotesis dengan metode statistik.

Berdasarkan topik permasalahan, maka variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menggunakan pengukuran variabel dengan cara menganalisis perbedaan dan persamaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Didesa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun indikator Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan keuangan dana desa dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan pengelolaan keuangan dana desa dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan Dana Desa, di

desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tahun 2017.

Fokus pada penelitian ini ialah analisis pengelolaan keuangan dana desa di desa Bululoe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Prosedur selanjutnya setelah melakukan penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh untuk dilakukan pengujian. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan laporan pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban tahun 2017 dan melakukan analisis dan evaluasi dengan cara menyesuaikan dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan menyesuaikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan pemerintah yaitu

Permendagri 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Dalam proses penyusunan RPJMDesa, pemerintah Desa Bululoe mengacu pada RPJM selama satu periode yang merupakan hasil musyawarah tingkat dusun pada tahun 2014. Semua hasil musyawarah pada tingkat dusun akan dibahas kembali dalam kegiatan musyawarah tingkat desa yang kemudian menghasilkan penetapan penyusunan RPJMDesa selama satu periode yaitu mulai tahun 2014-2020.

Untuk penyusunan RPJM Desa Bululoe Pemerintah Desa Bululoe menyusun perencanaan pembangunan (musrembang) desa sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan pembangunan Desa Bululoe terdiri atas perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah). Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh H.

Akhmad Situju, S.Sos selaku Kepala Desa Bululoe.

“Untuk proses penyusunan RPJM itu satu kali buat selama satu periode pemerintah Desa Bululoe, selanjutnya untuk menyusun RKPD maka pemerintah Desa Bululoe akan melihat kembali RPJM sebelumnya apa saja yang belum terlaksana, maka itu yang kita laksanakan dulu”. (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan untuk Penyusunan RPJM Desa Bululoe satu kali penyusunan selama satu periode pemerintahan, selanjutnya dari hasil RPJM maka akan dijabarkan dalam RKP Desa Bululoe pertahun anggaran.

RPJM Desa Bululoe memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa dan program-program kerja desa. RPJM Desa Bululoe untuk periode 2017 dijabarkan dalam program pembangunan tahunan desa atau disebut RKP Desa Bululoe.

2. Penganggaran

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran

RPJM Desa pertahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa tahap selanjutnya adalah penyusunan APBDesa sebagai realisasi anggaran RKP Desa. Sebelum menyusun dan penganggaran APB Desa di Desa Bululoe terlebih dahulu harus dibentuk panitia penyusun. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh H. Akhmad Situju selaku kepala Desa Bululoe sebagai berikut:

“Dalam proses penyusunan APBDesa sebelumnya dilakukan pembentukan tim RKPD yang diketuai oleh Sakaruddin selaku Sekretaris Desa Bululoe, selanjutnya dilakukan musyawarah sebelum diputuskan.” (wawancara tanggal 15 September 2018).

Kemudian Sakaruddin selaku sekretaris desa bululoe juga menyatakan hal serupa mengenai proses penganggaran APBDesa, yaitu:

“saya selaku ketua panitia tim penyusun RKPD, setelah saya dan teman-teman menyusun RKPD maka selajutnya kami menyusun APBDesa yang mengacu pada peraturan Desa.” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Hal ini didukung dari pernyataan Irnawati selaku Bendahara Desa Bululoe: “Nanti setelah RKPD di putuskan maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan APBD yang mengacu RKPD yang diputuskan sebelumnya.” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa maka dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran APBDesa Bululoe dimulai dengan pembentukan panitia RKPDesa yang diketuai oleh Sekretaris Desa Selanjutnya panitia RKPDesa mengadakan musyawarah desa mengenai penyusunan RKPDesa. RKPDesa menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa yang mengacu pada peraturan Desa dan disetujui oleh BPD.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana tahunan pemerintah desa bululoe yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Bululoe dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diperankan sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB kegiatan di Desa Bululoe menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban belanja kegiatan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara H. Akhmad Situju, S.Sos selaku Kepala Desa Bululoe yang mengatakan bahwa :

“kami membuat papan atau spanduk disetiap kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat tahu tentang besaran anggaran yang dikeluarkan dalam pembanguna”. (Wawancara pada tanggal 15 September 2018).

Hal ini di dukung dengan pernyataan Sakaruddin selaku Sekretaris Desa Bululoe yang mengatakan:

“Seperti yang dikatakan Pak Desa tadi bahwa untuk pelaksanaan keuangan Desa, kami membuat papan atau spanduk informasi tentang rincian anggaran yang dikeluarkan”. (Wawancara pada tanggal 15 September 2018).

Berdasarkan Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip pelaksanaan keuangan Desa Bululoe dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat pada penganggaran pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur desa yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian pembangunan setiap dusun.

4. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa khususnya bendahara desa yang dimulai dari menerima, menyimpan, menyetor/ membayar, menatausahakan, dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Irnawati selaku Bendahara Desa Bululoe:

“Untuk pencatatan saya menggunakan buku daftar penerimaan yang terdiri atas buku kas penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran (SPP)”. (Wawancara pada tanggal 15 September 2018).

Hal ini didukung oleh pernyataan Sakaruddin selaku sekretaris desa Bululoe:

“Untuk pencatatannya bendahara Desa menggunakan buku penerimaan dan pengeluaran dalam 1 buku kas.” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Hal ini sesuai dari pernyataan H. Akhmad Situju, S.Sos selaku Kepala Desa Bululoe:

“Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa yaitu buku kas pemasukan dan

pengeluaran, sedangkan untuk buku bank tidak dilakukan pencatatan karena langsung dicaikan dari bank dan untuk buku pajaknya tidak pernah melakukan pencatatan karena langsung dari pemerintah kabupaten yang melakukan pencatatan”. (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen yang digunakan yaitu berupa Buku daftar penerimaan yang terdiri atas buku kas penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran (SPP).

5. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa, kepala desa bululoe memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke

BPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan H. Akhmad Situju selaku Kepala Desa Bululoe:

“Laporan yang diserahkan kepada pemerintah des kepada pemerintah Kabupaten/Kota yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa persemester, laporan penggunaan Dana Desa, laporan bagi hasil pajak, dan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahunanggaran”. (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Hal ini didukung dari pernyataan oleh Sakaruddin selaku Sekretaris Desa Bululoe:

“Laporan yang harus kepala Desa sampaikan yaitu laporan pertanggungjawaban akhir tahun, ADD, Dana Desa, dan Laporan persemesteran.” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan yang diserahkan Pemerintah Desa Bululoe kepada Bupati/Walikota (melalui camat) berupa laporan realisasi penggunaan APBDesa persemesteran, laporan penggunaan Dana Desa, laporan penggunaan ADD, laporan bagi hasil pajak, dan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa Bululoe terdiri atas laporan semesteran pertama dan laporan semesteran akhir tahun. Laporan semesteran pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester atau dibandingkan dengan target anggarannya, sedangkan laporan semesteran akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersipat akumulasi hingga akhir tahun anggaran. Berikut ringkasan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa Bululoe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaen Jeneponto pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam hal Pengelolaan Keuangan Dana Desa telah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Permendagri No. 113

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP), terlihat dalam:

1. Perencanaan program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto secara bertahap telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib.
2. Penganggaran program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto telah menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan keuangan dana desa.
3. Pelaksanaan program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Penatausahaan Program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

belum melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang pelaksanaan keuangan desa dan tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP) karena belum melakukan pencatatan sesuai dengan aturan tetapi bendahara desa telah melaksanakan tanggungjawab yaitu menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 dan 38 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban dan pedoman pengelolaan keuangan desa (BPKP). Hal ini dibuktikan dari terlaksananya tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran terkait dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

1. Pemerintah Desa

Diharapkan kepada pemerintah Desa Bululoe untuk mencatat buku bank dan buku pajak desa secara rinci sesuai yang di rekening Koran yang dibank khususnya di penatausahaan keuangan Desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak Desa untuk diteliti, supaya dapat lebih memperluas wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru : Red Post press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pembangunan Desa.

Permendesa Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Daerah Jeneponto Nomor
900 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2015.

Pusdiklatwas. 2016. *Pengelolaan
Keuangan Desa*. BPKP. Bogor.

Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.